



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ALIZAR
2. Jabatan : STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
3. NHK : 653788

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 777.000.000

1. Tanah Seluas 166.5 m2 di KAB / KOTA ACEH SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 121.5 m2/93.5 m2 di KAB / KOTA ACEH SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah Seluas 1294.8 m2 di KAB / KOTA ACEH SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 87.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1500 S Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, SUZUKI UY 125 S AT Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 140.008.554**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.004.008.554

III. HUTANG Rp. 65.806.663

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 938.201.891

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.